

Judul : Tim Bayangan Mas Nadiem: DPR Merasa Heran, Gajinya dari Mana
Tanggal : Senin, 26 September 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tim Bayangan Mas Nadiem DPR Merasa Heran, Gajinya Dari Mana



Robert J Kardinal

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal kaget mendengar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memiliki "tim bayangan" beranggotakan 400 orang. Dia pun bertanya-tanya kapasitas, peran, fungsi, penganggaran tim bayangan ini dalam Kemendikbudristek.

"Tentu tim bayangan ini perlu dipertanyakan mulai dari legalitas rekrutmennya, atas nama apa formasinya. Bagaimana kepanjangannya, dari mana gajinya, dan bagaimana mekanisme kerjanya," tanya Robert, dalam keterangannya, di Jakarta, kemarin.

Politisi senior Fraksi Golkar ini berharap, ada penjelasan rinci dari Menteri Nadiem atas tim bayangan yang dibentuknya. Apalagi tim ini tidak pernah disampaikan dalam berbagai rapat kerja dengan Komisi X DPR sebagai mitra kerja Kemendikbudristek.

"Ini hal yang tidak lazim. Kami sebagai mitra tidak pernah dijelaskan tim bayangan ini. Ironisnya, ini kami ketahui setelah ramai pemberitaan Menteri Nadiem di acara United Nations Transforming Education Summit di markas besar PBB, Amerika Serikat," ujar eks-Ketua Fraksi Golkar ini.

Robert mempertanyakan skema penggajian terhadap 400 orang tim bayangan itu. Jika bersumber dari APBN, penggajian itu harus disampaikan ke publik dalam rangka asas transparansi penggunaan uang rakyat. Apalagi, tim bayangan ini

disebut-sebut setara dengan pejabat eselon I di Kemendikbudristek.

"Kalau dia bawa orang dari luar katakanlah misalnya dari BUMN, tetap saja pertanyaannya sumber dananya dari mana? Tidak bisa dia seenaknya walaupun menteri pakai duit pribadi bawa orang dari luar," tegas legislator asal Papua Barat ini.

Robert bilang, setiap pembentukan tim struktural di kementerian harus berdasar pada ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tim struktural yang dibentuk harus dilaporkan lebih dulu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk dikaji lebih dahulu kebutuhannya.

Dari kajian tersebut, Kementerian PANRB baru bisa merestui terbentuknya tim struktural tersebut atau sifatnya hanya sementara. Jika sifatnya sementara, masa kerjanya tidak boleh melebihi 6 bulan.

"Kalau tim bayangan ini dari luar ASN, ya nggak bisa," jelasnya.

Robert akan mengusulkan kepada Komisi X DPR agar dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menuntaskan masalah birokrasi di Kemendikbudristek ini.

Bagaimanapun, setiap kebijakan yang dibentuk harus berdasarkan regulasi dan aturan undang-undang yang berlaku.

"Dalam kementerian kan sudah diatur ada dirjen, direktur hingga pegawai struktural hingga fungsional di bawahnya. Jadi tidak bisa, kementerian itu dikelola seperti manajemen perusahaan," pungkas Robert.

Kepala Pusat Data dan Teknologi dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek Muhammad Hasan Chabibie menyampaikan, tim yang disebut Menteri Nadiem merupakan tim teknologi. Mereka terdiri dari para ahli di bidang teknologi, data dan aplikasi.

Tim ini terlibat dalam merancang dan mengembangkan berbagai platform teknologi untuk sektor pendidikan. ■ KAL